

## **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Stefanus Arwandi Jai, Dody Setyawan, Ignatius Adiwidjaja**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang

Email. Stefanus@gmail.com

***Abstract :** Indonesia in one of country that has big count of citizen. The big Increased of citizen can be a problem that connects with civilization. The government has made a system called SIAK. SIAK is information system that formed based on procedure and based on information and communication technology purpose to handle civilization and administration system in Indonesia. This research is purpose to know, how about the implementation of SIAK and difficulties of implementation SIAK at District Office Tunggulwulung, Malang City. This research is using structural interview method with 10 points of questions about implementation of SIAK and difficulties in implementation of SIAK at District Office Tunggulwulung, Malang. The results of interview is implementation of SIAK in District Office Tunggulwulung has done according to procedure and rule from Official Civilization at Malang City. Difficulties in implementation of SIAK are slow response of internet connection and sending data to Dispenduk still use manual method. Advice for next research is other factor that can block the implementation of SIAK and it influence to efficiency of SIAK implementation can be added.*

***Keyword :** Implementation, SIAK*

**Abstrak :** Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran yang tidak merata menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” (SIAK) yang merupakan sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari SIAK dan juga hambatan dalam pelaksanaan program SIAK di Kantor Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan kisi-kisi pertanyaan sebanyak 10 soal yang meliputi implementasi SIAK di Kantor Kelurahan Tunggulwulung dan juga hambatan dalam pelaksanaan SIAK. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah, implementasi dari SIAK di Kelurahan Tunggulwulung sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari Dinas Kependudukan Kota Malang. Hambatan dalam implementasi SIAK diantaranya jaringan internet yang lambat dan juga pengiriman berkas ke Dispenduk yang masih manual. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat ditambahkan tentang factor lain yang menghambat implementasi SIAK dan pengaruhnya terhadap efisiensi dari pelaksanaan program SIAK.

**Kata Kunci :** Implementasi, SIAK

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran yang tidak merata disertai dengan rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum merata, termasuk di Kota Malang.

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan berperan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Dengan adanya pelayanan administratif tersebut maka hak dan kebutuhan dasar warga negara akan terjamin karena dokumen yang dapat menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya tersebut sangat vital dalam kehidupan warga. Sehingga pelayanan tersebut sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara (Dwiyanto, 2010)

Untuk itu Pemerintah Pusat telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” (SIAK) yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Insani, 2006).

SIAK merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. (wikipedia, 2014). SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya (Munarja, 2014).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 tentang Nomor Induk Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 yang memuat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kota Malang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem ini yang diperkuat oleh Peraturan Walikota Malang No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Masalah mendasar dalam administrasi kependudukan adalah yang berkenaan dengan penduduk. Sampai sekarang di wilayah Kota Malang, yang juga berlaku di daerah lain di Indonesia, Pemerintah Daerah menganggap yang perlu didaftar hanyalah penduduk resmi saja, yang berarti menggunakan konsep *de jure*. Padahal dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 ditegaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal (*de facto*) (Rohman, dkk, 2012).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak terjadi permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat misalnya pelayanan yang dirasa kurang efektif dan efisien oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang implementasi program SIAK secara langsung di lapangan yang meliputi tahapan-tahapannya, manfaat, permasalahan dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat. Oleh karena itu penulis mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Studi Kantor Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian ilmiah diperlukan metode yang akan dipakai agar tujuan penelitian dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari pengertiannya bahwa metode pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha mengenali dan menggambarkan fenomena implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang.

Peneliti memakai populasi sebagai obyek penelitian karena SIAK telah diterapkan di seluruh kantor kelurahan di Kota Malang.

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *nonprobability* sampling dengan jenis accidental sampling yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan kebetulan bertemu (Sugiyono, 2011) dalam arti seluruh pegawai yang pada saat pengumpulan data dilaksanakan berada di kantor Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil yang didapatkan adalah di Kelurahan Tunggulwulung sudah dilaksanakan Sistem SIAK sesuai dengan prosedur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Masyarakat juga sudah mengerti tentang Prosedur SIAK dan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Program SIAK yang sudah terlaksana di Kantor Kelurahan Tunggulwulung kota Malang juga tidak terlepas dari berbagai hambatan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hambatan dari implementasi Program SIAK di Kantor Kelurahan Tunggulwulung, diantaranya adalah pengiriman data yang dilakukan masih manual sehingga petugas masih harus mengirim berkas ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

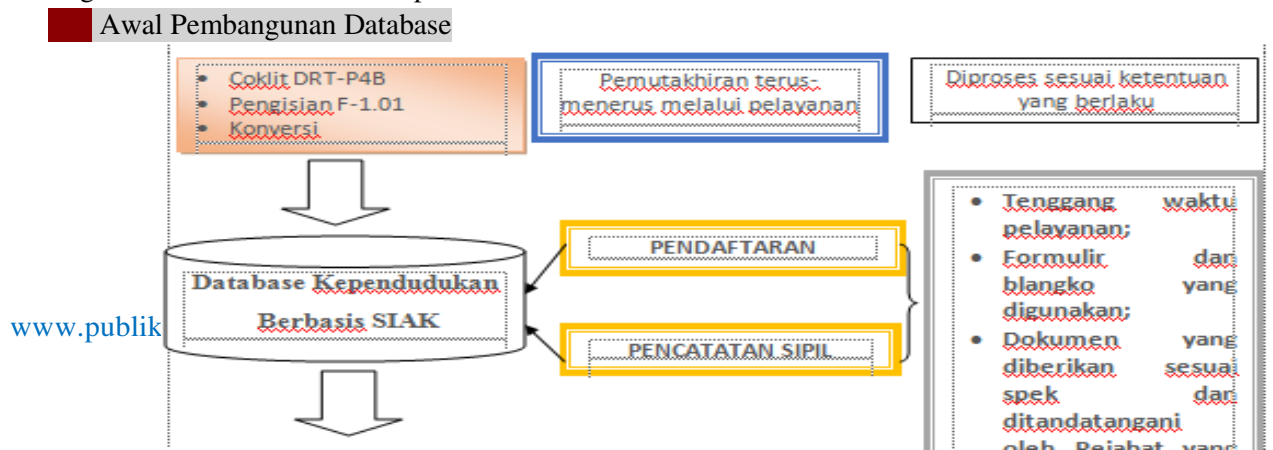
Selain itu, program SIAK yang pelaksanaannya menggunakan jaringan internet juga terhambat karena lambatnya jaringan internet yang tersedia. Selain dari hambatan-hambatan itu, program SIAK bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## Dasar Hukum Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Dalam pelaksanaan SIAK di Kelurahan Tunggulwulung, didasari oleh beberapa undang-undang dasar 1945, diantaranya adalah ;

1. Undang- undang dasar 1945 pasal 26 ayat (3) : Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur oleh undang-undang.
2. Undang- undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
3. Undang- undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006.
4. Kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013, yang meliputi ;
5. Pasal 5 : Pengelolaan dan penyajian data Kependudukan secara nasional merupakan kewenangan menteri dalam negeri.
6. Pasal 6 : Penyajian data kependudukan skala provinsi yang telah dibersihkan oleh kemendagri merupakan kewenangan gubernur.
7. Pasal 7 : Penyajian data kependudukan skala kabupaten / kota yang telah dibersihkan oleh kemendagri merupakan kewenangan Bupati/Walikota.
8. Pasal 8 : Penerbitan dokumen kependudukan merupakan kewenangan dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota (Wahyudi, 2005).

Bagan 1. Alur Administrasi Kependudukan



### **Implementasi SIAK di Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang**

SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. SIAK merupakan suatu sistem pembaharuan yang merupakan hasil evaluasi dari SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan), dimana penggantian ini dilakukan oleh pemerintah dikarenakan banyaknya kelemahan pada SIMDUK.

Pencatatan data penduduk suatu daerah yang melalui sistem informasi administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa dan kelurahan sebagai awal dari pendataan penduduk disuatu daerah. Selanjutnya data-data tersebut akan disimpan kedalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet.

Pelaksanaan Program SIAK di Kantor Kelurahan Tunggulwulung sudah berjalan dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, implementasi dari Program SIAK juga dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas, sehingga prosedur dan pelaksanaan program SIAK dapat berjalan dengan lancar sampai saat dilakukan penelitian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang, terdapat beberapa keuntungan dari pelaksanaan Program SIAK ini, baik bagi masyarakat maupun bagi Kantor Kelurahan sendiri.

Keuntungan Program SIAK bagi masyarakat adalah masyarakat dipermudah dengan akses atau pengurusan administrasi kependudukan dengan adanya program SIAK ini. Sedangkan keuntungan untuk Kantor Kelurahan adalah mempermudah dalam mengakses data SIAK masyarakat di Kelurahan Tunggulwulung.

Menurut Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kelurahan Tunggulwulung, Implementasi dari Program SIAK ini sudah efektif dan efisien, dengan dibukanya loket dispenduk di Kelurahan Tunggulwulung mempercepat pelayanan bagi masyarakat di Kelurahan Tunggulwulung.

Hasil penelitian yang dilakukan juga menyatakan pendapat masyarakat tentang Program SIAK, dimana masyarakat merasa dengan adanya Program ini maka masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Dispenduk, dan segala keperluan administrasi kependudukan bisa dilayani di Kelurahan.

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Program SIAK**

Program SIAK yang sudah terlaksana di Kantor Kelurahan Tunggulwulung kota Malang juga tidak terlepas dari berbagai hambatan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hambatan dari implementasi Program SIAK di Kantor Kelurahan Tunggulwulung, diantaranya adalah pengiriman data yang dilakukan masih manual sehingga petugas masih harus mengirim berkas ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Selain itu, program SIAK yang pelaksanaannya menggunakan jaringan internet juga terhambat karena lambatnya jaringan internet yang tersedia. Selain dari hambatan-hambatan itu, program SIAK bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Implementasi dari SIAK di Kantor Kelurahan Tunggulwulung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Pelaksanaannya lebih efisien dan efektif baik bagi Masyarakat maupun bagi Kelurahan.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan SIAK adalah pengiriman berkas yang masih dilakukan secara manual dan jaringan internet yang lambat, mengingat bahwa program SIAK dilaksanakan dengan menggunakan jaringan internet.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Insani, Istyadi. 2006. *Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal STIA LAN Jakarta
- Rohman, dkk.2012. *Reformasi Pelayanan Publik, Program Sekolah Demokrasi*. Malang: Averroes Press
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Wahyudi, W. P. 2005. *Makna Tertib Dokumen Kependudukan bagi Reformasi Pelayanan Publik, Penegakkan Hukum, Demokrasi dan Perwujudan Good Governance*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Wikipedia. 2014. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*.